



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(L P E D)**



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2018

Urusan yang dilaksanakan :

Urusan Perhubungan

I. URUSAN PERHUBUNGAN

A. Jumlah Program Sebanyak 12 (dua belas) Program dan Sebanyak 40 (empat puluh) Kegiatan.

Rincian Program dan Kegiatan :

No.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGUNG										TINGKAT CAPAIAN (%)
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	
	URUSAN PERHUBUNGAN	364.100.000	9.851.409.780	297.000.000	12.501.840.220	23.014.350.000	325.550.000	9.377.287.635	263.147.527	10.779.370.444	20.745.355.606	90,14
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	142.650.000	682.840.303	-	-	825.490.303	139.300.000	613.129.331	-	-	752.429.331	91,15
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		211.979.000			211.979.000		187.058.702			187.058.702	88,24
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	116.400.000	4500000			120.900.000	113.050.000	3.672.000			116.722.000	96,54
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13.000.000	4.712.500			17.712.500	13.000.000	4.712.500			17.712.500	100,00
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		18.480.000			18.480.000		10.000.000			10.000.000	54,11
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor		34.097.870			34.097.870		34.088.471			34.088.471	99,97
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		38.903.548			38.903.548		30.805.800			30.805.800	79,19
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		17.079.910			17.079.910		13.874.028			13.874.028	81,23
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.000	35.502.875			35.752.875	250.000	26.300.000			26.550.000	74,26
9	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		14.500.000			14.500.000		12.520.000			12.520.000	86,34
10	Penyediaan Makan dan Minuman		44.040.000			44.040.000		38.369.200			38.369.200	87,12
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		115.350.000			115.350.000		108.819.800			108.819.800	94,34
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		63.900.000			63.900.000		63.900.000			63.900.000	100,00
13	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		79.794.600			79.794.600		79.008.830			79.008.830	99,02
14	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	13.000.000				13.000.000	13.000.000				13.000.000	100,00
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	71.250.000	304.610.000	105.000.000	52.141.070	533.001.070	69.250.000	223.117.336	104.347.527	50.041.070	446.755.933	83,82
1	Pengadaan meubiler	250.000			52.141.070	52.391.070	250.000			50.041.070	50.291.070	95,99
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	28.600.000		105.000.000		133.600.000	27.000.000		104.347.527		131.347.527	98,31
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	42.400.000	304.610.000			347.010.000	42.000.000	223.117.336			265.117.336	76,40
III.	Program Peningkatan disiplin aparatur	-	-	-	24.000.000	24.000.000	-	-	-	24.000.000	24.000.000	100,00
1	Pengadaan Pakaian Beserta kelengkapannya (PDH)				24000000	24.000.000				24000000	24.000.000	100,00
IV.	Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	86.806.036	-	-	86.806.036	-	84.845.581	-	-	84.845.581	97,74
1	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		86.806.036			86.806.036		84.845.581			84.845.581	97,74
V.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	38.000.000	2.503.841.850	-	1.994.149.150	4.535.991.000	18.000.000	2.304.939.800	-	820.147.300	3.143.087.100	69,29
1	Pembangunan fasilitas transportasi pedesaan (DAK)	19.200.000	2.430.441.850		1994149150	4.443.791.000		2.239.906.300		820.147.300	3.060.053.600	68,86
2	Pembangunan FasilitasTransportasi Pedesaan (Penunjang DAK)	18.800.000	73.400.000			92.200.000	18.000.000	65.033.500			83.033.500	90,06
VI.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	9.500.000	19.741.070	60.000.000	-	89.241.070	3.000.000	13.968.970	59.800.000	-	76.768.970	86,02
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas	5.800.000	5.601.350	25.000.000		36.401.350	800.000	5.536.250	24800000		31.136.250	85,54
2	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR)	3.700.000	14.139.720	35.000.000		52.839.720	2.200.000	8.432.720	35.000.000		45.632.720	86,36
VII.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	36.200.000	586.218.731	-	-	622.418.731	35.700.000	566.726.733	-	-	602.426.733	96,79
1	Penunjang Kegiatan WTN	6.000.000	32.461.800			38.461.800	5.500.000	30.856.600			36.356.600	94,53
2	Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	6.000.000	147.045.000			153.045.000	6.000.000	146.362.750			152.362.750	99,55
3	Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut	13.200.000	112.475.600			125.675.600	13.200.000	112.204.053			125.404.053	99,78

No.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGUNG										TINGKAT CAPAIAN (%)
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	
4	Pembinaan dan Penertiban Transportasi Perhubungan Laut	6.000.000	54.804.851			60.804.851	6.000.000	53.828.100			59.828.100	98,39
5	Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas	5.000.000	20.815.500			25.815.500	5.000.000	19.178.150			24.178.150	93,66
6	Pemilihan Sopir Teladan (Abiyasa)		16.684.500			16.684.500		15.924.600			15.924.600	95,45
7	Operasional Pelayanan Transportasi Pendidikan		201.931.480			201.931.480		188.372.480			188.372.480	93,29
viii.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	-	-	-	30.600.000	30.600.000	-	-	-	30.000.000	30.000.000	98,04
1	Pembangunan Pagar, taman kantor dan papan nama (merk dinas)				30600000	30.600.000				30.000.000	30.000.000	98,04
ix.	Program Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas	33.400.000	4.911.790.300	132.000.000	7.160.950.000	12.238.140.300	27.200.000	4.837.558.097	99.000.000	6.616.793.074	11.580.551.171	94,63
1	Pembangunan Penerangan jalan Umum	8.400.000			6.645.950.000	6.654.350.000	8.400.000			6.608.793.074	6.617.193.074	99,44
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum	25.000.000	4.911.790.300	132.000.000	15.000.000	5.083.790.300	18.800.000	4.837.558.097	99.000.000	8.000.000	4.963.358.097	97,63
3	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Pelangai Kec. Ranah Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari propinsi tahun 2018)				175.000.000	175.000.000					-	-
4	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kenagarian lagan Kec. Linggo sari baganti (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari propinsi tahun 2018)				175.000.000	175.000.000					-	-
5	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kenagarian Koto Salapan Kec. Ranah Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari propinsi tahun 2018)				150.000.000	150.000.000					-	-
x.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	27.100.000	294.817.890	-	3.240.000.000	3.561.917.890	27.100.000	291.106.077	-	3.238.389.000	3.556.595.077	99,85
1	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	16.800.000	242.089.090			258.889.090	16.800.000	241.397.872			258.197.872	99,73
2	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	10.300.000	52.728.800		3.240.000.000	3.303.028.800	10.300.000	49.708.205		3.238.389.000	3.298.397.205	99,86
xi.	Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpajakan	6.000.000	130.913.500	-	-	136.913.500	6.000.000	130.389.310	-	-	136.389.310	99,62
1	Pelayanan Terminal dan Perpajakan	6.000.000	130.913.500			136.913.500	6.000.000	130.389.310			136.389.310	99,62
xii.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	329.830.100	-	-	329.830.100	-	311.506.400	-	-	311.506.400	94,44
1	Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah		329.830.100			329.830.100		311.506.400			311.506.400	94,44

B. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan:

- Masih Rendahnya SDM yang ada pada Dinas Perhubungan
- Masyarakat pengguna jalan belum sepenuhnya mematuhi peraturan tata tertib berlalu lintas di jalan raya dan kurang memperhatikan faktor keselamatan.
- Penyelenggaraan dan Pengawasan terhadap pemasangan dan pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas serta perlengkapan jalan lainnya masih belum optimal

2. Solusi:

- Melakukan Peningkatan SDM melalui Pendidikan, Pelatihan serta Bimbingan Teknis.
- Melakukan Sosialisasi tentang tertib lalu lintas dan tata cara berkendara yang baik
- Melakukan pengadaan dan pemasangan Rambu-Rambu di lokasi-lokasi rawan kecelakaan dan daerah rawan longsor

**DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PER 31 DESEMBER 2018**

No.	Nama / NIP	Kualifikasi Pendidikan Terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		SD/ SLTP	SLTA	D.III	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
I	Dinas Perhubungan															
1	Ir. NUZIRWAN. N, MT 19670826 199803 1 001					√	√					√		√		
2	HASRIAL AMRI, SSTP 19760402 199511 1 001				√		√					√			√	
3	PRIS DERIKA HABDI, SH 19750101 200701 1 015				√		√				√					√
4	ADMAI DEDI, ST 19650613 199703 1 001					√	√				√					√
5	FADLI AMRA, SH, MM 19761006 199403 1 001					√	√				√					√
6	VERAWATI, S.Sos 19760605 200801 2 029				√			√			√					√
7	HILDA ZUSWARNI, SE 19750425 200902 2 003				√			√			√					√
8	ARLIM ARIF 19660621 199003 1 006		√				√				√					
9	EDDY RICARDO, SH 19690514 200604 1 003				√		√				√					
10	NIKO RIAN TO 19790112 200701 1 004				√		√				√					
11	MAR TALENA, SH 19640405 198908 2 001				√			√			√					√
12	HERRY SUSILO, ST 19640401 198602 1 006				√		√				√					√
13	AGUSTAR, SP 19630925 198711 1 001				√		√				√					√

No.	Nama / NIP	Kualifikasi Pendidikan Terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		SD/ SLTP	SLTA	D.III	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
14	YHOHANA RIZA, SH, M.Si 19650808 199303 2 006					√		√				√				√
15	DANOFRIN 19621107 198503 1 005		√				√				√					√
16	ERMAN JUSA, SH 19730301 199403 1 003				√		√				√					
17	A R N I 19601231 199010 2 002		√					√			√					
18	JANUARDI, SE 19730126 200604 1 004				√		√				√					
19	ELZA NILAWATI, SE 19831227 200902 2 005				√			√			√					
20	NOFRIZON, S.Sos 19711106 200701 1 002				√		√				√					
21	MAHENDRA, S.Ip 19740525 200701 1 008				√		√				√					
22	YENDRA RIVALI, ST 19730307 200701 1 008				√		√				√					
23	DEDI HARISANDU 19850131 200801 1 003				√		√				√					
24	ALEXANDER ADIGUNAWAN, A.Md 19780803 200604 1 003			√			√				√					
25	AFFANDI 19780928 200701 1 005				√		√				√					
26	RENO EFFENDI 19801115 200701 1 003				√		√				√					
27	SUKO MUCHTARUM SURI 19801007 200701 1 003				√		√				√					
28	SYAMSU AKMAL 19670329 200212 1 002		√				√			√						

No.	Nama / NIP	Kualifikasi Pendidikan Terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)				
		SD/ SLTP	SLTA	D.III	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
29	IMRAN 19671105 200604 1 003		√				√			√							
30	AIDAL 19690901 200604 1 004		√				√			√							
31	MARJONI CANDRA 19751124 200604 1 008		√				√			√							
32	JOHN HENDRA 19700722 200701 1 007		√				√			√							
33	NOVENDRIADI 19721027 200701 1 003		√				√			√							
34	SUDRIANTO 19730709 200701 1 004		√				√			√							
35	WENDRI KARTIN 19730416 200701 1 006		√				√			√							
36	JAMRA SURYA 19740705 200701 1 012		√				√			√							
37	DONI HENDRI 19760606 200701 1 011		√				√			√							
38	DELVI DORIS 19780618 200701 1 007		√				√			√							
39	ADE PUTRA 19840417 200701 1 002		√				√			√							
40	NOVAN ANDREW 19841122 201001 1 005		√				√			√							
41	YUDI HERMANTO 19840711 201001 1 012		√				√			√							
42	RAMA BERNANDO 19861029 201001 1 002		√				√			√							
43	YUSRIZAL 19691007 201212 1 003		√				√			√							

No.	Nama / NIP	Kualifikasi Pendidikan Terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		SD/ SLTP	SLTA	D.III	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
44	ETIKA TAMZIL 19761105 201212 1 004		√				√			√						
T O T A L			20	1	19	4	38	6		17	24	3		1	1	10

Painan, 15 Januari 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PESISIR SELATAN



SUNAWAN, S.Sos, M.Si

NIP. 19700204199101 1 002

**TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : PESISIR SELATAN
 NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PERHUBUNGAN

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 7 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 7 program	100%	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada sebanyak 7 yang terdiri dari: 1. SOP tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2. SOP tentang Peminjaman dan Pengembalian Rambu-rambu Portabel 3. SOP tentang Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Barang 4. SOP tentang Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Perdesaan 5. SOP tentang Parkir 6. SOP tentang Peminjaman Bus 7. SOP tentang Pengaduan	Ada 7 (tujuh) SOP	
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada dibagi PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya	Tidak ada	
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	100%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	

4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak personil 44 - Total PNS Kabupaten, sebanyak 6.827 personil	0,64		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 orang - Pejabat yang ada, sebanyak 16 orang	25%		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 16 jabatan	100%		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2014 sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	4 Jenis Dokumen		
			10	Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	Jumlah Program RKPDP yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah , sebanyak 12 Program Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 12	100%	
			11	Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program.	100%	

		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program.	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 27.001.730.340,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.737.442.460.796,-	1,55%	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 12.507.740.220,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 27.001.730.340,-	46,32%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 297.000.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 9.813.879.680,-	3,03%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 297.000.000,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 27.001.730.340,-	1,10%	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Lra, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. Laporan Ekuitas 5. Laporan Fungsional	Ada sebanyak 5 (lima) jenis	

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Daftar Inventaris Barang Milik Daerah	Ada sebanyak 1 (satu) Dokumen	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan sebanyak 110 dengan nilai Rp. 894.441.174,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 21.929.937.084,-	4,08%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/ prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Pengumuman di Mass Media	3 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak ada	

Painan, 15 Januari 2019
KEPALA DINAS PERHUB UNGAN
KABUPATEN PESIRIS SELATAN



GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700204 199101 1 002

**TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAINAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
16	Perhubungan	56	Angkutan Darat	$\frac{\text{Jumlah angkutan Darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}} \times 100$	$\frac{2.479}{785.603} \times 100 = 0,32$	

JENIS-JENIS PELAYANAN

- 1. Pelayanan Administrasi
- 2. Pelayanan Informasi
- 3. Pelayanan Jasa
- 4. Pelayanan Jasa Lainnya
- 5. Pelayanan Jasa Lainnya
- 6. Pelayanan Jasa Lainnya

Mekanisme Pelayanan Perizinan



LAYANAN PENGADUAN

SAHABAT KEMAHALIHAYATAN KABUPATEN PESIUR SELATAN

SAHABAT KEMAHALIHAYATAN KABUPATEN PESIUR SELATAN

SAHABAT KEMAHALIHAYATAN KABUPATEN PESIUR SELATAN

WISATA WANGSA PERHIBINGAN

WISATA WANGSA PERHIBINGAN

WISATA WANGSA PERHIBINGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

TATA CARA PELAKSANAAN PENGADUAN MASYARAKAT

No	Uraian	Waktu	Tempat	Penanggung Jawab
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



TAMU HARAP
LAPOR

**MEJA PIKET
PELAYANAN
INFORMASI DAN
PENGADUAN**

